



*Jateng*  
gayeng



GEOPORTAL PROVINSI JAWA TENGAH

# KEBIJAKAN SATU PETA DALAM SATU DATA INDONESIA

DISAMPAIKAN OLEH :

DJOKO SARWONO

KEPALA SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

**BIDANG STATISTIK DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH**

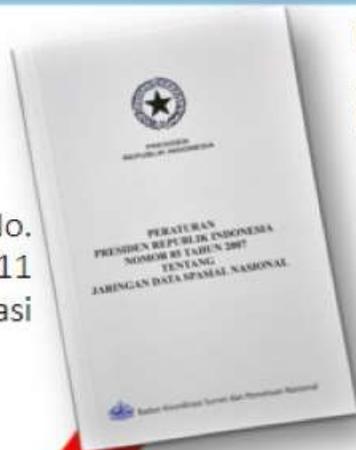
# DASAR HUKUM



**UU No. 4/2011 :**  
Informasi Geospasial



**PP No. 9/2014 :**  
Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial



**Perpres RI No. 85/2007**  
Jaringan Data Spasial Nasional

**DIUBAH**

**PerPres No. 27/2014 :**  
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGNas)

**Perpres No. 9/2016 :**  
Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000



**Pergub No. 69/2009 :**  
Simpul JDSD dan Unit Kliring

UNIT KERJA  
UNIT KLIRING

**UNIT KERJA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN DG & IG**

**NEXT**

**UNIT KERJA PENYIMPANAN, PENGAMANAN, DAN PENYEBARLUASAN DG & IG**

**Perpres No. 39/2019 :**  
Satu Data Indonesia



# VISI MISI GUBERNUR JAWA TENGAH

## VISI

Menuju Jateng Sejahtera & Berdikari

*“Tetep mboten korupsi mboten ngapusi”*

## MISI

**01**  
Membangun Masy Jateng  
yang religious, toleran &  
guyup untuk menjaga NKRI



**02**  
Mempercepat RB yang Dinamis  
serta memperluas sasaran ke  
Pemerintah Kab./Kota



**03**  
Memperkuat Kapasitas ekonomi rakyat &  
membuka lap. Kerja untuk mengurangi  
kemiskinan & pengangguran



**04**  
Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat,  
lebih pintar, lebih berbudaya & mencintai  
lingkungan



Tugas dan Fungsi UU  
23/2014 (Lamp UU  
23/2014) & Pergub  
70/2016

DINAS KOMINFO

SEKRETARIAT

Pelayanan PPID Pembantu, Pegawai, Keuangan, Aset Internal, Peningkt Kapasitas SDM, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kantor.

BIDANG IKP

1. Penyebarluasan & Pengelolaan info & kom publik pemprov
2. Layanan Aduan Masyarakat

BIDANG TIK

1. Penyediaan *Bandwidth*
2. Pelayanan *Data Center*
3. Pembangunan *Fiber Optic*

BIDANG EGOV

1. Rekom Pemb Sistem/Aplikasi
2. Pengelolaan nama domain & sub domain dari pusat
3. Pengelolaan e-Gov pemprov (Pengembangan dan Integrasi Aplikasi)
4. *Smart Province*

BIDANG STATISTIK

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Prov (*Single Data System & Open Data*)
2. PPID Utama
3. Penyelesaian Sengketa Informasi (KIP)
4. Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional

BIDANG  
PERSANDIAN & KI

1. Penyelenggaraan persandian pemprov
2. Penetapan pola hub komunikasi sandi antar SKPD
3. Keamanan Informasi (*cyber security*)

**SUBSTANSI MATERI SATU DATA  
INDONESIA (SDI)  
SESUAI PERPRES 39/2019**

**STATISTIK**

- 1. Statistik Dasar
- 2. Statistik Sektoral
- 3. Statistik Khusus

**SDI**

**SPASIAL**

**BERDASAR KSP  
TERDAPAT 85 IGT**

SDI : SATU DATA INDONESIA  
KSP : KEBIJAKAN SATU PETA  
IGT : INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

# SATU DATA INDONESIA (SDI)

- KOORDINATOR  
- SEKRETARIAT  
(BAPPEDA)

- WALI DATA  
(KOMINFO)

**SDI**

- DATA STATISTIK  
- DATA SPASIAL

- PRODUSEN DATA (ESS 3)  
- WALIDATA PEMBANTU  
(ESS2)

# SUBSTANSI MATERI SATU DATA INDONESIA (SDI) SESUAI PERPRES 39/2019

STATISTIK SEKTORAL



GEOSPASIAL



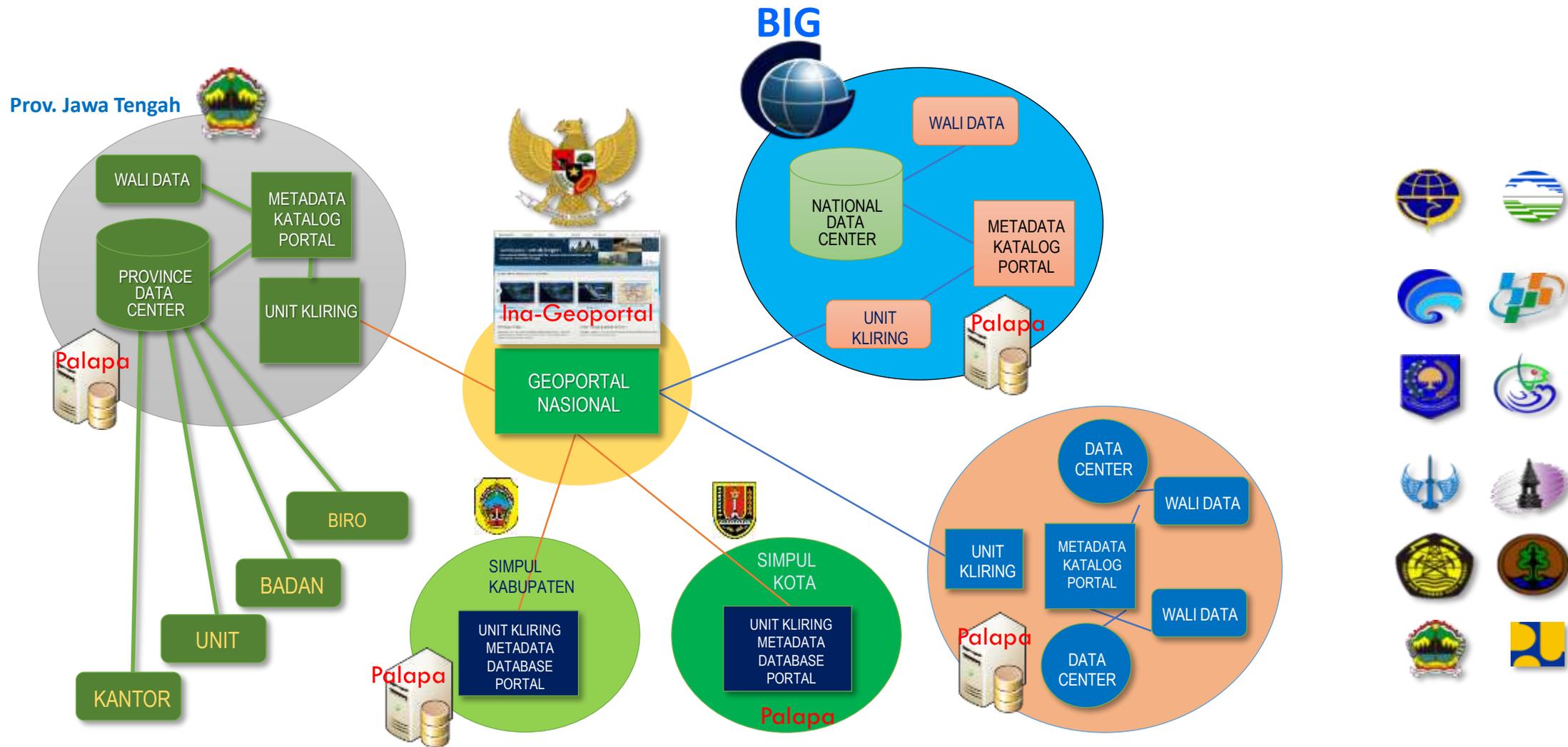
GEOPORTAL PROVINSI JAWA TENGAH

# JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

- ❑ Jaringan informasi geospasial nasional yang selanjutnya disebut jaringan IGN adalah suatu system penyelenggaraan pengelolaan IG secara **bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.**
- ❑ Jaringan IGN diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi **berbasis teknologi informasi dan komunikasi.**  
(Pasal 2 Perpres 27/2014)



# JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL



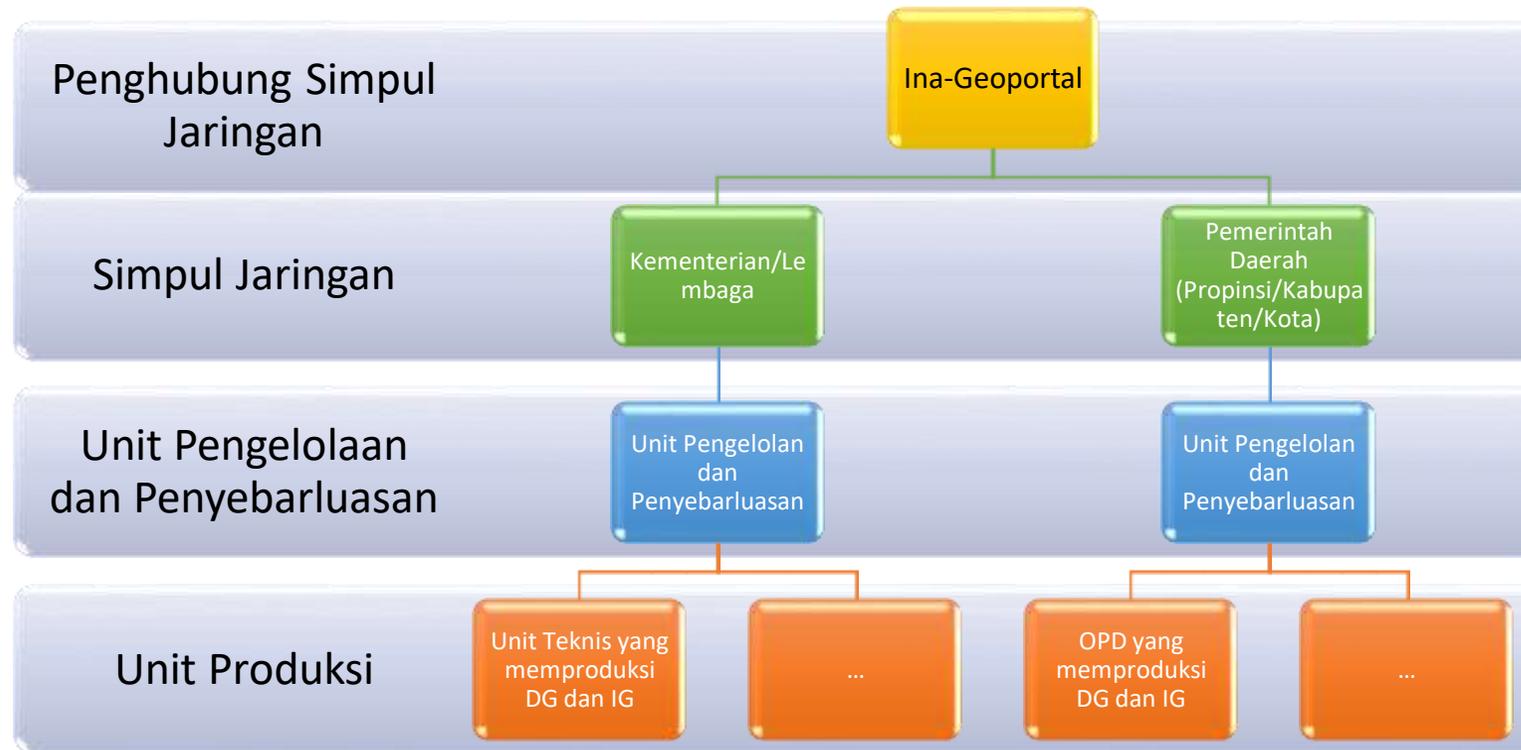
## 7 Tema dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)

```
graph TD; A[7 Tema dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP)] --> B[1. Batas Wilayah<br/>2. Kehutanan<br/>3. Perencanaan Ruang<br/>4. Sarana Prasarana<br/>5. Perizinan dan Pertanahan<br/>6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan<br/>7. Kawasan Khusus dan Transmigrasi]; B --> C[Dari 7 Tema tersebut dibagi lagi ke dalam 85 Peta Tematik yang menjadi kewenangan dari 19 K/L, dimana 62 Peta Tematik kewenangan dari Provinsi];
```

1. Batas Wilayah
2. Kehutanan
3. Perencanaan Ruang
4. Sarana Prasarana
5. Perizinan dan Pertanahan
6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan
7. Kawasan Khusus dan Transmigrasi

Dari 7 Tema tersebut dibagi lagi ke dalam 85 Peta Tematik yang menjadi kewenangan dari 19 K/L, dimana 62 Peta Tematik kewenangan dari Provinsi

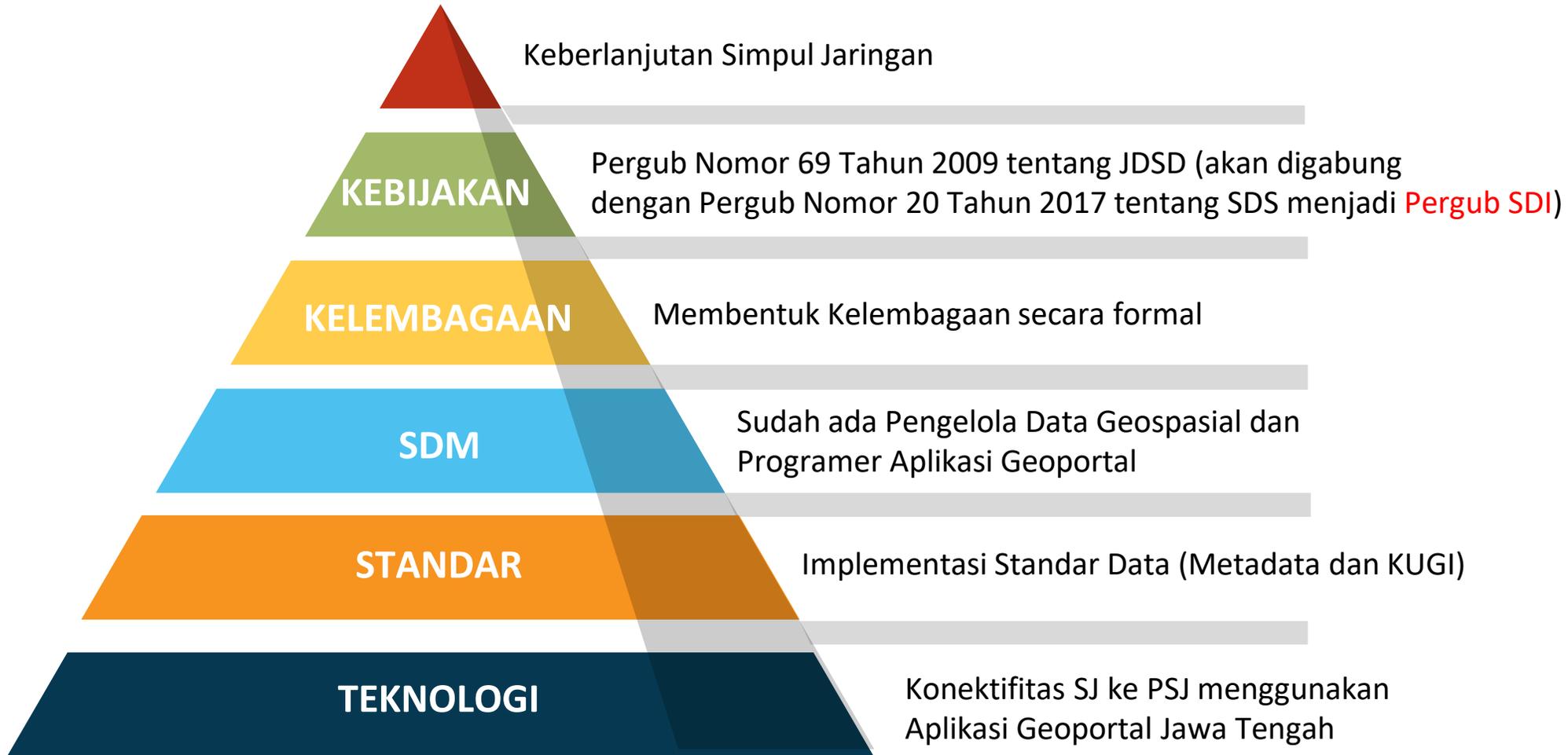
# JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL



Pada Simpul Jaringan ada dua jenis unit kerja:

1. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG, dan
2. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG.

# IMPLEMENTASI PILAR JIGN DI SIMPUL JARINGAN JAWA TENGAH



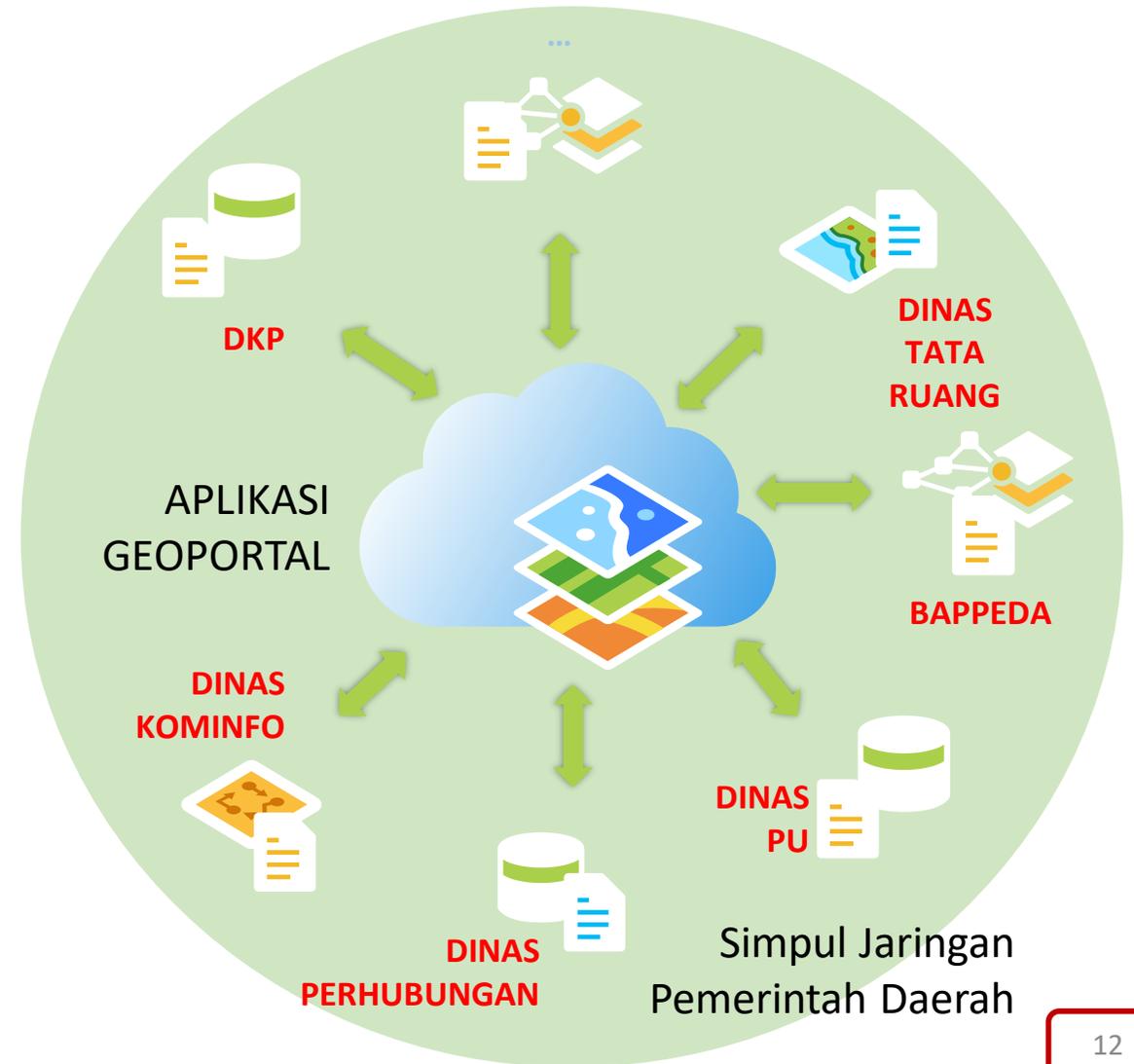
# Aplikasi Geoportal

“Aplikasi simpul jaringan berbasis *open source* yang mendukung penyelenggaraan IG”

- Pengumpulan
- Penyimpanan
- Pengamanan
- Penyebarluasan

## Fitur Utama:

- Pencarian melalui katalog geospasial
- Pengelolaan, publikasi, dan penyimpanan metadata
- Unggah (upload) dan unduh (download) DG
- Penyajian peta yang interaktif
- Mendukung standar dan terintegrasi dengan Ina-Geoportal



**PENGELOLAAN JARINGAN  
INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL  
DI JAWA TENGAH**

# Partisipasi SKPD dalam Mendukung Terwujudnya JIGN



1. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;



# Kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional



Permohonan personil untuk menjadi bagian di kelembagaan JIGN dari masing-masing SKPD



Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk pembentukan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional



# SUMBER DATA

DATA TABULAR

KOORDINAT

PETA GIS

SUMBER LAIN..

Tabel Ms. Excel

- Kondisi Lingkungan
- Jml. Penduduk
- Produksi Padi
- dll...

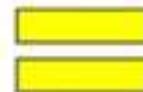
Koordinat

Lokasi Adm.\*

- Kabupaten/Kota
- Kecamatan
- Kelurahan/Desa



PETA DASAR



PETA TEMATIK

\*) Tabel Format Isian disediakan

File Koordinat



PETA DASAR



PETA TEMATIK

Penyesuaian (Jika Diperlukan)



PETA TEMATIK

Sumber Lain

- Citra Satelit
- Gambar Peta
- dll...

Penyesuaian & Digitasi



PETA TEMATIK



# JENIS-JENIS DATA GEOSPASIAL

No	Nama Data Spasial	Format	Skala	Bentuk Data Spasial			Jenis Data Spasial		
				Titik	Garis	Area	Dasar	Tematik	Rencana
	<b>Batas Administrasi Indonesia</b>								
1	Batas Administrasi Desa	Shapefile				V	V		
2	Batas Administrasi Kecamatan	Shapefile				V	V		
3	Batas Administrasi Kabupaten	Shapefile				V	V		
4	Batas Administrasi Provinsi	Shapefile				V	V		
	<b>Batas Administrasi Jawa Tengah</b>								
5	Batas Administrasi Desa	Shapefile	250.000			V	V	V	
6	Batas Administrasi Kecamatan	Shapefile	250.000			V	V	V	
7	Batas Administrasi Kabupaten	Shapefile	250.000			V	V	V	
8	Batas Administrasi Provinsi	Shapefile	250.000			V	V	V	
	<b>Batas Administrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah</b>								
9	Batas Administrasi Desa	Shapefile	25.000				V	V	
10	Batas Administrasi Kecamatan	Shapefile	25.000				V	V	
11	Batas Administrasi Kabupaten	Shapefile	25.000				V	V	
12	Batas Administrasi Provinsi	Shapefile	25.000				V	V	
13	Jalan	Shapefile	25.000			V	V	V	
14	Sungai	Shapefile	25.000			V	V	V	
15	Titik Pusat Kota	Shapefile	25.000	V			V		
16	Titik Pusat Kecamatan	Shapefile	25.000	V			V		
	<b>Jaringan Jalan</b>								
17	Jalan Jawa Tengah	Shapefile	25.000			V	V		
18	Jalan RBI Jawa Tengah	Shapefile	25.000			V	V		
19	Jalan RTRW Jawa Tengah	Shapefile	250.000			V	V		
	<b>Jaringan Sungai</b>								
20	Sungai Jawa Tengah	Shapefile				V	V		
21	Sungai Jawa Tengah	Shapefile	25.000			V	V		
22	Sungai Jawa Tengah DIY	Shapefile	25.000			V	V		
	<b>Kontur</b>								
22	Kontur	Shapefile				V	V		
	<b>Perairan</b>								
23	Garis Pantai	Shapefile				V	V		
24	Garis Pantai Jawa Tengah	Shapefile				V	V		
25	Danau	Shapefile				V	V		
26	Laut Jawa Tengah DIY	Shapefile				V	V		

No	Nama Data Spasial	Format	Skala	Bentuk Data Spasial			Jenis Data Spasial		
				Titik	Garis	Area	Dasar	Tematik	Rencana
	<b>Rencana Struktur Ruang</b>								
	<b>Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi</b>								
36	Depo BBM	Shapefile		V					V
37	Pelabuhan Laut	Shapefile		V					V
38	Sarana Transportasi Laut	Shapefile		V					V
39	Pelabuhan Udara	Shapefile		V					V
40	Sarana Transportasi Udara	Shapefile		V					V
41	Rel Kereta Api	Shapefile			V				V
42	Sarana Stasiun Kereta Api	Shapefile		V					V
43	Stasiun Kereta Api	Shapefile		V					V
44	Sarana Terminal Penumpang	Shapefile		V					V
45	Terminal Angkutan Penumpang	Shapefile		V					V
46	Sarana Transportasi Sungai	Shapefile		V					V
	<b>Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi Kelistrikan</b>								
47	Jaringan Transmisi Listrik	Shapefile			V				V
48	Jaringan Sutet	Shapefile			V				V
49	Pengembangan Listrik	Shapefile		V					V
50	Pembangkit Listrik	Shapefile		V					V
	<b>Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air</b>								
51	Jaringan Pipa Gas Transmisi	Shapefile			V				V
52	Jaringan Pipa	Shapefile			V				V
53	Jaringan Irigasi	Shapefile			V				V
54	Waduk	Shapefile		V					V
	<b>Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan</b>								
55	Prasarana Persampahan	Shapefile		V	V				
	<b>Rencana Sistem Jaringan Jalan</b>								
56	Rencana Jaringan Jalan	Shapefile			V				V
57	Rencana Pengembangan Jalan	Shapefile			V				V
58	Outer Ringroad Petanglong	Shapefile			V				V
59	Outer Ringroad Semarang	Shapefile			V				V
60	Sistem Pelayanan Perkotaan	Shapefile				V			V
	<b>Rencana Pola Ruang</b>								
61	Kawasan Budidaya	Shapefile			V				V
62	Kawasan Lindung	Shapefile			V				V
63	Rencana Tata Ruang	Shapefile			V				V

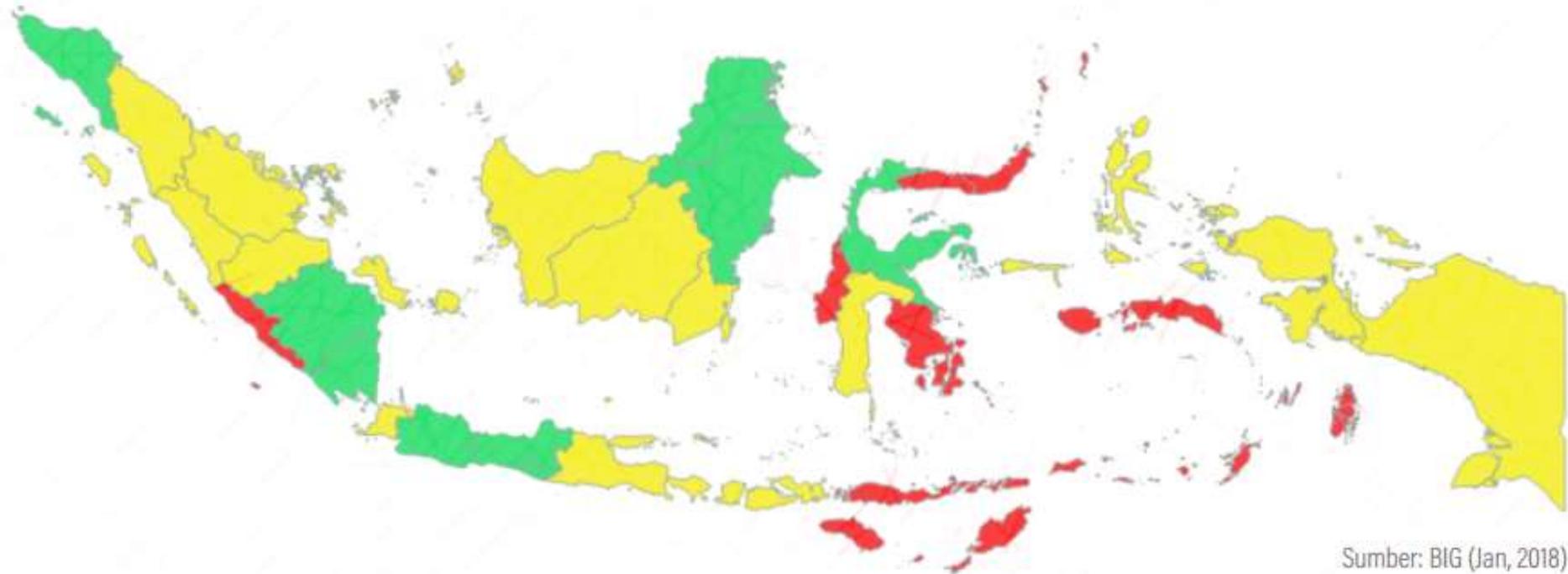
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

## Hasil Assessment BIG Terhadap Kelembagaan JIGN

No	Provinsi	Geo Portal				Kelembagaan	
		Alamat	Peta Perda RTRW Provinsi/ Kabupaten /Kota	Peta Batas Administrasi Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa /Kelurahan	Peta Tanah Ulayat atau Hutan Adat (jika ada)	Unit Pengelolaan	Landasan Hukum
1	Provinsi Banten	<a href="http://geoportal.bantenprov.go.id/">http://geoportal.bantenprov.go.id/</a>	-	-	-		
2	Provinsi DKI Jakarta	<a href="https://tataruang.jakarta.go.id">https://tataruang.jakarta.go.id</a> (webgis)	-	-	-	- Bappeda Prov sebagai Unit Kliring - Bappeda + Diskominfomas sbg Unit Penyebarluasan	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
3	Provinsi Jawa Barat	<a href="http://geodatabase.pusdalibang.jabarprov.go.id">http://geodatabase.pusdalibang.jabarprov.go.id</a> (tidak terkoneksi)	V	V	-	- UPTB Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah [BPPAPD]	Perda Provinsi Jawa Barat No. 24, Tahun 2014 - Pergub No. 80, Tahun 2015
4	Provinsi Jawa Tengah	<a href="http://geoportal.jatengprov.go.id">http://geoportal.jatengprov.go.id</a>	V	V	-	- Bidang Statistik - Diskominfo - Unit Pelaporan Teknik	Pergub No. 69 Th. 2009 SK Gub No. 050/62/2009 (Tim Koordinasi JDSD)
5	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<a href="http://gis.jogjaprov.go.id">http://gis.jogjaprov.go.id</a>	V	V	-	<b>Balai Statistik Daerah</b> Bappeda Prov Daerah Istimewa Yogyakarta	Pergub No. 78 tahun 2017 tentang pengelolaan data pembangunan daerah
6	Provinsi Jawa Timur	<a href="http://geoportal.jatimprov.go.id">http://geoportal.jatimprov.go.id</a>	V	V	-	- Bappeda Prov Jawa Timur UPT Penataan Ruang dan Geospasial	Pergub No. 117, Tahun 2016 Pergub No. 23, Tahun 2010



## SIMPUL JARINGAN DAERAH SEBAGAI INFRASTRUKTUR BAGI-PAKAI KEBIJAKAN SATU PETA



**9** Simpul Jaringan Operasional    **18** Simpul Jaringan Belum Optimal    **7** Belum menjadi Simpul Jaringan

Data spasial dalam Kebijakan Satu Peta dibagi-pakaikan dalam skema Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Namun, hingga saat ini sebagian besar Simpul Jaringan di Daerah masih belum optimal



## Simpul Jaringan Kab/Kota Di Jawa Tengah dan Kelembagaan IG

	TARGET	CONNECTED	TO DO
Kab./Kota	35	4	31

Arcgis	Palapa	Non-Palapa/Arcgis
-	2	2

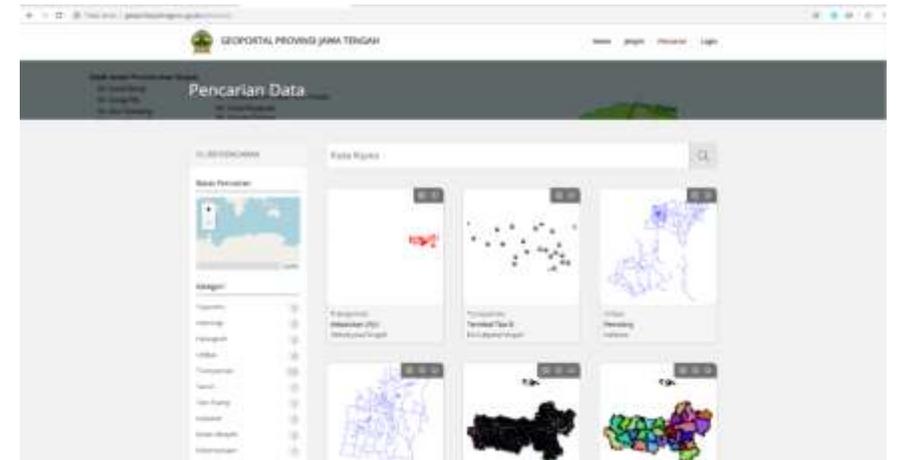
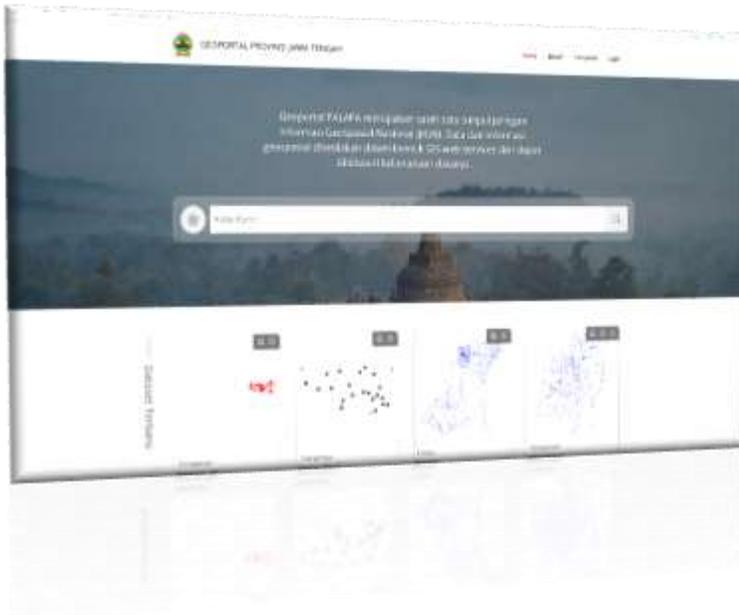
- **Kab.Klaten**  
<http://geoportal.klatenkab.go.id>
- **Kota Tegal**  
<http://tegalkota.ina-sdi.or.id>

- **Kab.Sragen**  
<http://geoportal.sragenkab.go.id>
- **Kota Magelang**  
<http://sig.magelangkota.go.id>

- **Kota Semarang**  
<http://distaru.semarangkota.go.id/webgis=tataruang>
- **Kab. Sukoharjo**  
<http://pisda.sukoharjokab.go.id>
- **Kab. Karanganyar**  
<http://layangmas.karanganyarkab.go.id>

Sedang Proses Integrasi

# Portal Geospasial Jawa Tengah (Geoportal)

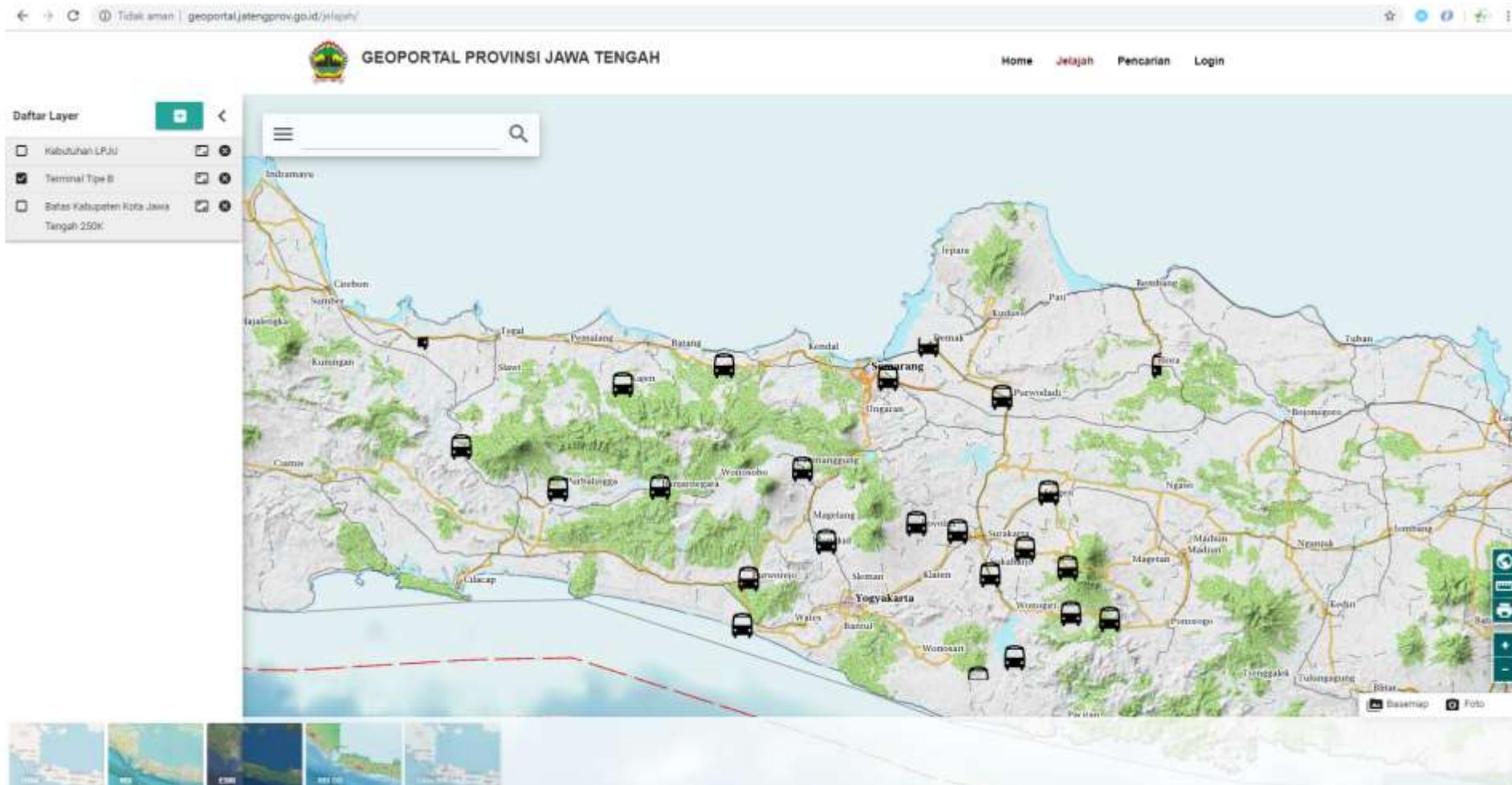


<http://Geoportal.jatengprov.go.id>

# Portal Geospasial Jawa Tengah (Geoportal)

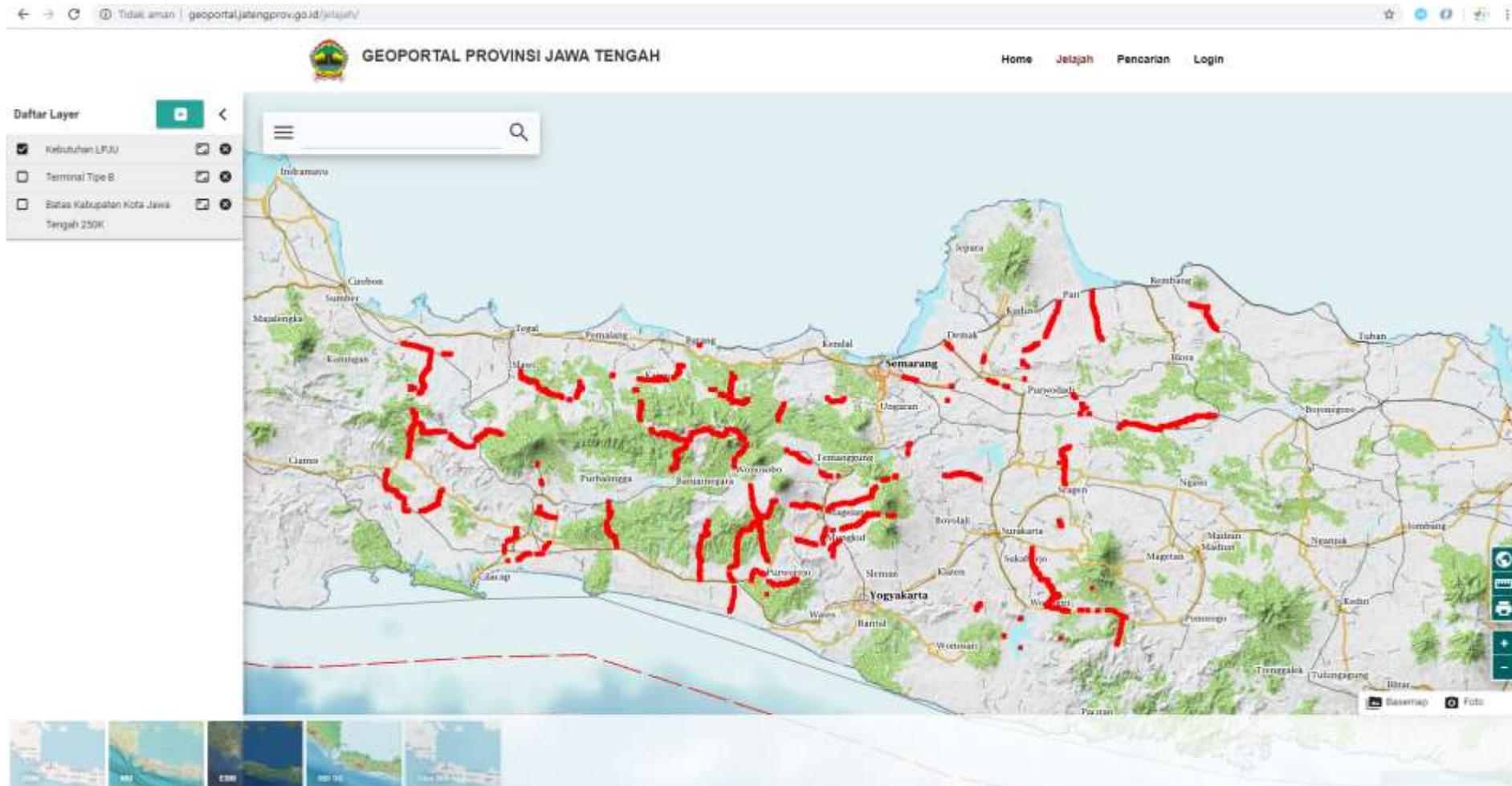


GEOPORTAL PROVINSI JAWA TENGAH



**Portal pencarian dan integrasi informasi geospasial dari berbagai sumber terpercaya**

# Portal Geospasial Jawa Tengah (Geoportal)



**Data Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum**

# Portal Geospasial Jawa Tengah (Geoportal)



GEOPORTAL PROVINSI JAWA TENGAH

The screenshot displays the Geoportal website for Central Java. The browser address bar shows the URL [geoportal.jatengprov.go.id/jawajtv/](http://geoportal.jatengprov.go.id/jawajtv/). The page header includes the logo and the text "GEOPORTAL PROVINSI JAWA TENGAH", along with navigation links for "Home", "Jelajah", "Pencarian", and "Login".

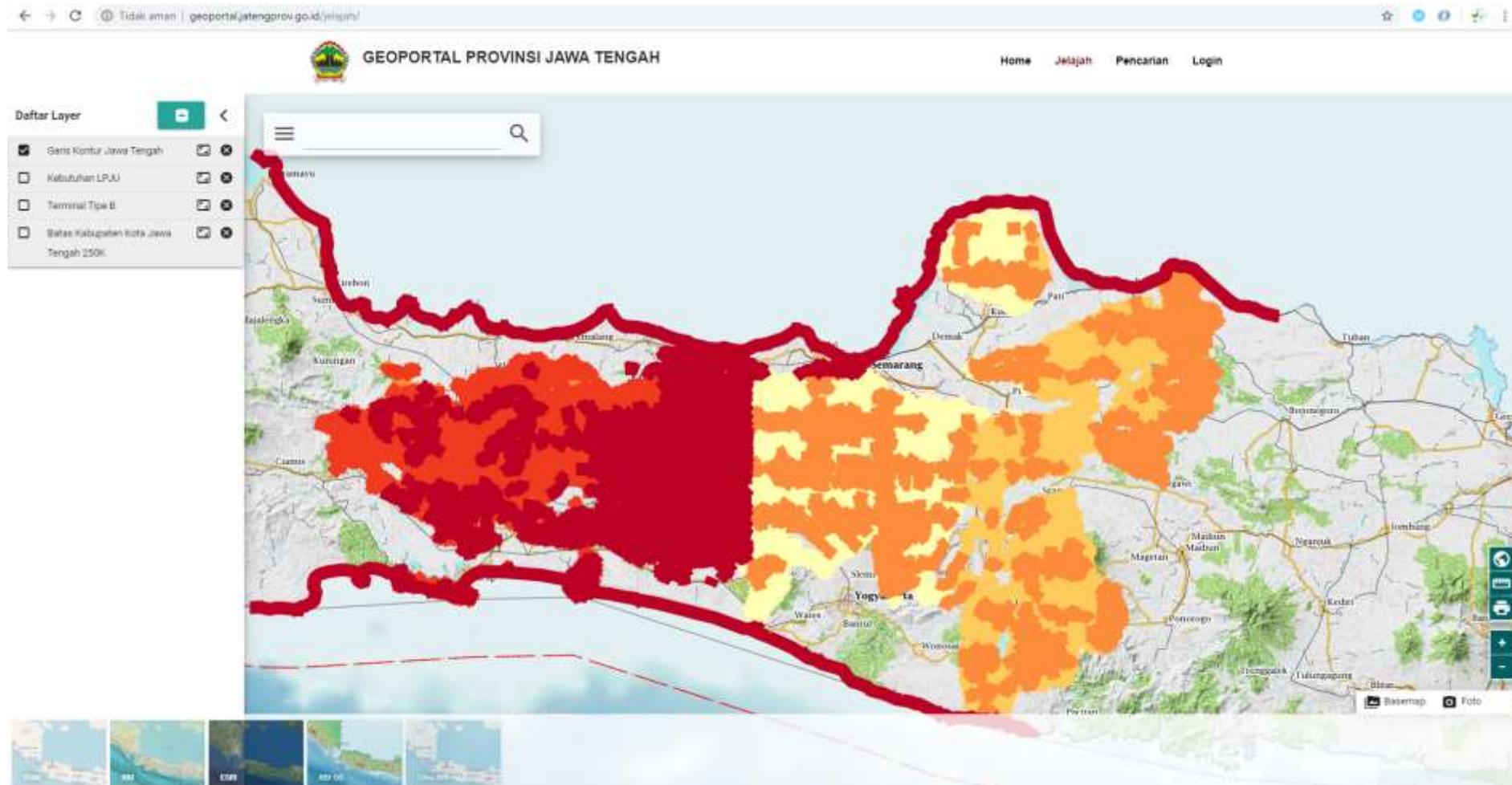
On the left side, there is a "Daftar Layer" (Layer List) panel with the following items:

- GARIS PANTAI JAWAT (Etiyah\_LN\_25K)
- Data Kontur Jawa Tengah
- Kebutuhan LRJU
- Terminal Tipe B
- Batas Kabupaten Kota Jawa Tengah 250K

The main map area shows a topographic map of Central Java with a thick blue line representing the coastline. The city of Semarang is clearly visible. A search bar is located at the top left of the map area. On the right side, there are navigation controls including a scale bar, a north arrow, and a "Foto" button. At the bottom left, there are several small thumbnail maps showing different geographic views.

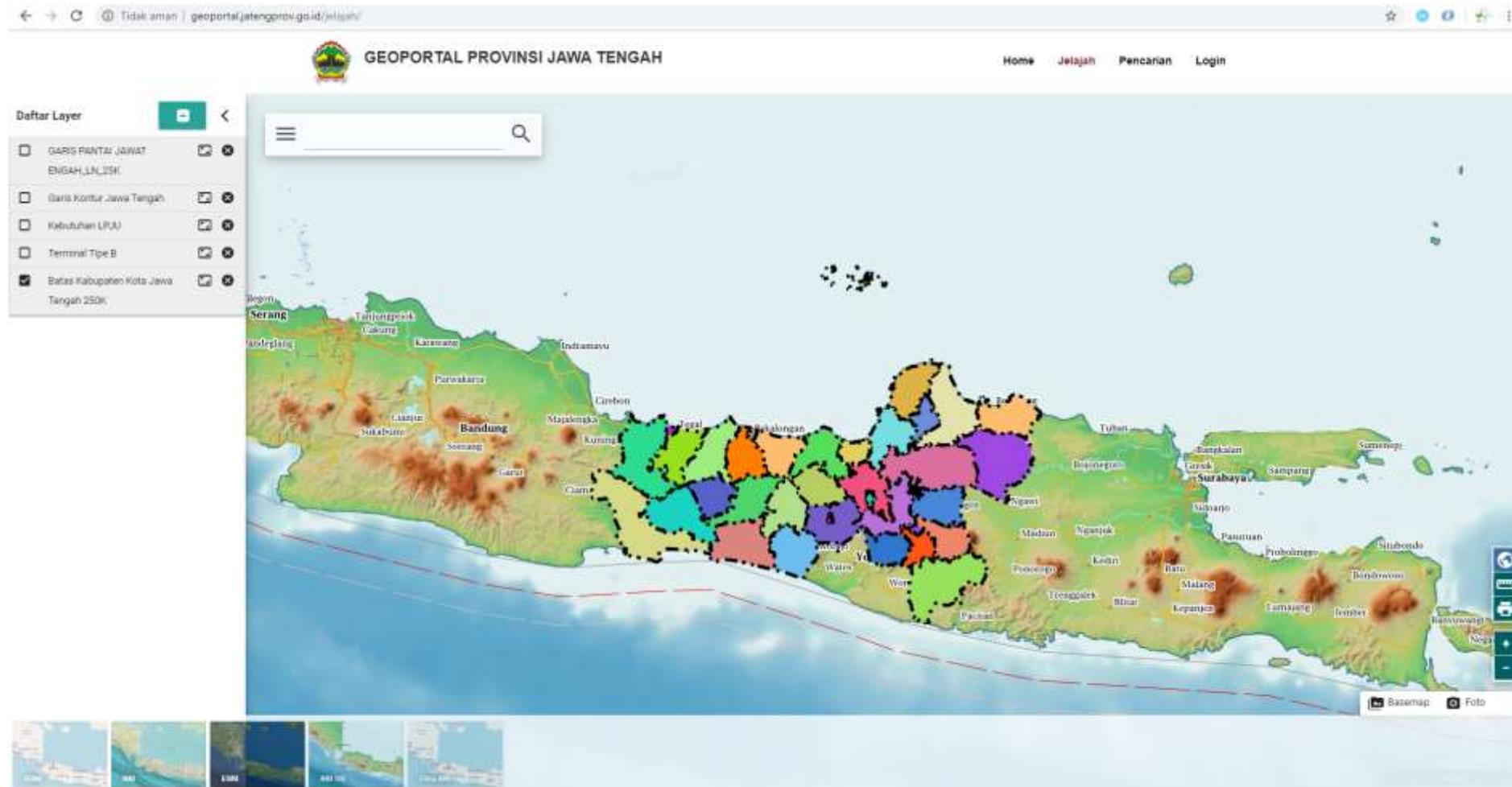
Data Garis Pantai

# Portal Geospasial Jawa Tengah (Geoportal)



Data Garis Kontur

# Portal Geospasial Jawa Tengah (Geoportal)



**Data Batas Administrasi Kabupaten/Kota**

## Manfaat yang diperoleh dari JIGN



### **MEMPERMUDAH DAN MEMPECEPAT**

1. Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Ruang
2. Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Lahan
3. Pelaksanaan Program-program Pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastruktur
4. Penyelesaian Batas Wilayah
5. Proses Percepatan Penerbitan Perijinan
6. Meningkatkan Keandalan Informasi terkait Lokasi dari berbagai Aktifitas Ekonomi

# DAMPAK JIKA KSP TIDAK DILAKSANKAN

## KONFLIK DI PERBATASAN DAERAH



Dua kepala daerah menerbitkan izin di lokasi yang sama.

## SENGKETA TANAH



Sengketa tanah akibat tumpang tindih lebih dari 1 jenis perizinan pada lokasi yang sama.

## PEMBANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA RUANG

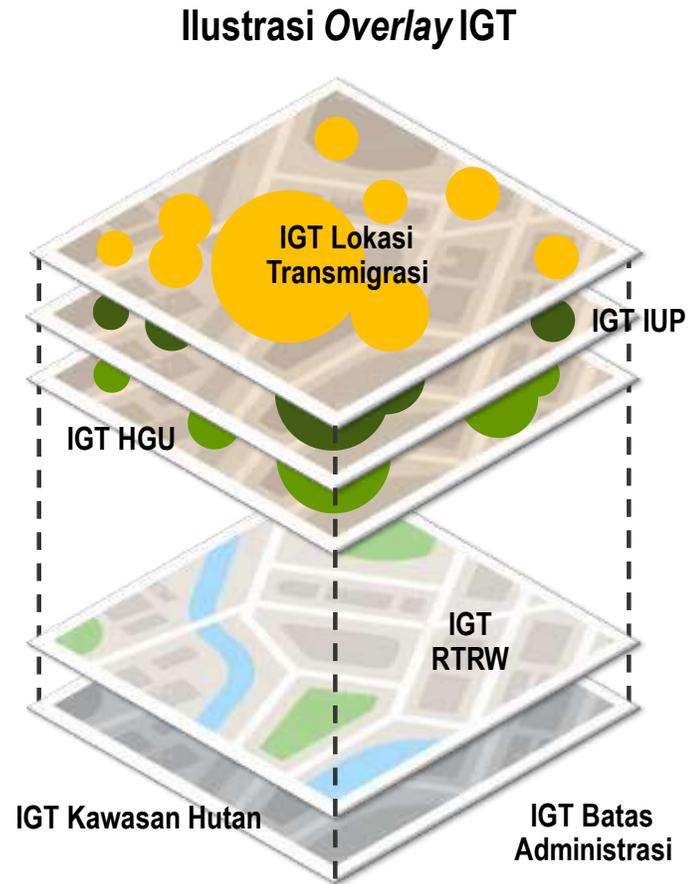


Lokasi pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang.

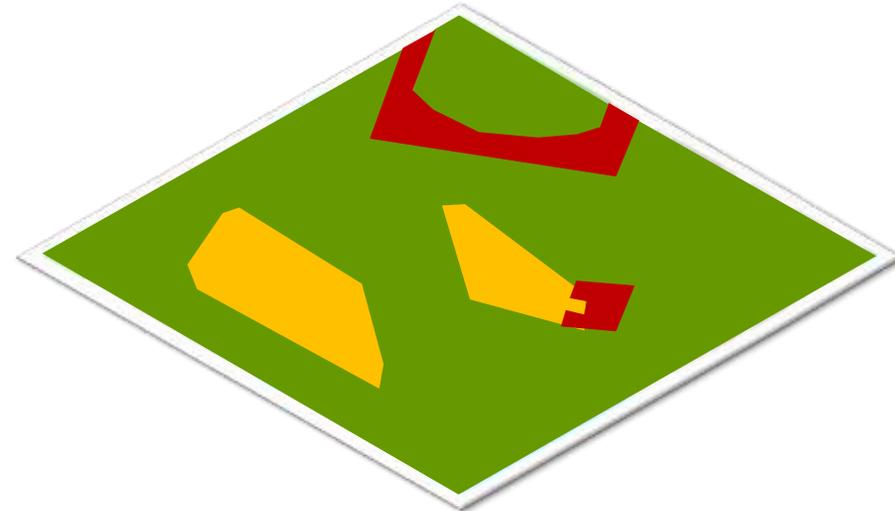


Diperlukan satu peta yang akurat dan akuntabel, serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung aktivitasnya.

# DAMPAK JIKA KSP TIDAK DILAKSANKAN



**Ilustrasi Tumpang Tindih**



- 1 Area Penggunaan Lain (Penetapan Kawasan Hutan)
- 2 Hutan Produksi Terbatas (RTRWP)
- 3 Pertanian Lahan Basah (RTRWK)

## TINDAK LANJUT

Konfirmasi dari Pemerintah Daerah (SKPD Terkait) terhadap hasil identifikasi permasalahan tumpang tindih sesuai dengan kewenangannya.

# UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

## 1. Bimtek Data Statistik Sektor



# UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

## 2. Bimtek Data Geospasial



# UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

## 3. Penyusunan Perubahan Pergub SDI



GUBERNUR JAWA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 69 TAHUN 2009  
TENTANG  
SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH DAN UNIT KLIRING  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GUBERNUR JAWA TENGAH  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SINGLE DATA SYSTEM DI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : \_\_\_ / \_\_\_ / 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

(Masih dalam Proses)



Kebijakan Satu Peta



GEOPORTAL PROVINSI JAWA TENGAH



**TERIMA**

**KASIH**